

KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN MANAJEMEN LABA DI INDONESIA

C. Bintang Hari Y

Fakultas Bisnis Unika Widya Mandala Surabaya

ABSTRAK

Dewan direksi memiliki tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan. Penelitian ini meneliti karakteristik papan asosiasi dan manajemen laba. Direksi luar memberikan kontribusi dalam proses pengawasan pelaporan keuangan. Pembuat kebijakan juga mengharapkan peran direktur luar dalam mengendalikan kualitas pelaporan keuangan. Manajemen laba dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan pendekatan Modified Jones untuk memperkirakan akrual diskresioner. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk menguji karakteristik dewan direksi manajemen laba.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik dan tidak termasuk institusi keuangan perusahaan. Jumlah direksi yang tidak begitu banyak untuk mengurangi intensitas pertemuan antara anggota dewan. Juga diperlukan direktur independen yang berfungsi melindungi pemegang saham dalam kasus konflik keagenan. Direksi juga diharapkan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Keberadaan direktur independen untuk menekan perilaku manajemen guna mengelola pendapatan tetapi tidak menunjukkan efek yang signifikan. Keberadaan dewan direksi tidak untuk menekan manajemen laba, hal ini karena kemungkinan intensitas yang tidak sering dilakukan pertemuan dan memahami bisnis perusahaan yang tidak cukup baik. Kepemilikan Manajerial di Indonesia tidak mendominasi kepemilikan keseluruhan sehingga tidak ada kecenderungan untuk mengelola laba perilaku manajemen yang dapat memberikan keuntungan pribadi.

Kata kunci: karakteristik dewan direksi dan manajemen laba.

ABSTRACT

Board of directors has a responsibility in the financial reporting process. This study will examine the association board characteristics and earnings management. Directors outside contributed in the process of supervision of financial reporting. Policy makers also expect the role of directors outside in controlling the quality of financial reporting. Earnings management in this study will be calculated using the approach of Modified Jones to estimate discretionary accruals. This study also uses control variables to test the characteristics of the board of directors of earnings management. The sample used in this research is a public company and does not include corporate financial institutions. The number of directors who are not so much to ease the intensity of a meeting among the members of the council. Also needed independent directors who serve to protect shareholders in case of agency conflict. These directors are also expected to have accounting and financial background. The existence of independent directors to suppress behavior management to manage earnings but did not show significant effect. The existence of the board of directors not to suppress earnings management. This is because the possibility of intensity that is not often done meeting and understanding the company's business that are not good enough. Managerial Ownership in Indonesia does not dominate the overall ownership so there is no tendency to manage earnings management behavior that can provide personal benefits.

Keywords: characteristics of the board of directors and earnings management.



1. PENDAHULUAN

Perusahaan menerapkan *corporate governance* dengan tujuan menjaga kualitas pelaporan keuangan. Salah satu instrumen yang dipercaya memiliki peran penting adalah dewan komisaris terutama dalam hal pengawasan manajemen puncak (Fama and Jansen, 1983). Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan untuk menghasilkan keuntungan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan kemungkinan satu sama lain memiliki kepentingan yang tidak sejalan. *Stakeholders* berkepentingan terhadap kemakmuran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengupayakan keseimbangan kepentingan *stakeholder* untuk mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat bagi seluruh entitas masyarakat. *Corporate governance* mengatur aspek-aspek yang terkait dengan (Djalil, 2000):

- (a) keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- (b) pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*, yang mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan seluruh *stakeholders* (keseimbangan eksternal) untuk mewujudkan perusahaan sebagai *good corporate citizen*.

Dewan komisaris merupakan salah satu komponen dari mekanisme *good corporate governance*. Direksi merupakan organ perseroan yang menjalankan tugas melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai amanat dari pemegang saham yang ditetapkan dalam RUPS. Sebagai pemegang amanat dari pemegang saham, Direksi harus bertanggung-jawab penuh atas pengurusan Perseroan.

Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan pelaporan keuangan dengan kualitas yang baik. *Corporate governance* menggambarkan prosedur-prosedur peningkatan kualitas laporan keuangan, memiliki penekanan pada peran dewan komisaris dalam menekan manipulasi laba dan dalam meyakinkan bahwa memberikan informasi yang tepat tentang operasi perusahaan (Young, 1998).

Beberapa pengujian empiris menginformasikan bahwa perusahaan di Inggris dan Amerika menunjukkan dewan komisaris perusahaan mempengaruhi manipulasi laba dan kualitas laporan keuangan, dan karakteristik dewan komisaris juga berpengaruh dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan.

Dewan komisaris yang independen dapat menurunkan manipulasi laba oleh manajer (Beasley, 1996; Dechow et al., 1995; Peasnell et al., 2000; Klein, 1998; Xie et al., 2003). Dechow (1995) menguji karakteristik *governance* perusahaan, dan Beasley (1996) menguji hubungan antara komposisi dewan komisaris dan kecurangan laporan keuangan. Kedua penelitian tersebut menggambarkan hubungan antara dewan komisaris dan manajemen laba.

Manajemen laba yang terdapat di perusahaan dapat dijelaskan dengan atribut perusahaan seperti tingkat biaya politik (Jones, 1991), adanya perencanaan bonus berdasarkan laba (Holthausen et al., 1995; Healy, 1985) dan pelanggaran perjanjian hutang (DeAngelo et al., 1994; DeFond dan Jambalvo, 1994). Manajemen laba adalah suatu pilihan oleh manajer dari kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Manajemen laba berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingannya berkaitan dengan kompensasi, kontrak hutang dan biaya politik. *Shareholders* dapat mengurangi biaya agensi yang disebabkan oleh konflik kepentingan dengan manajer dengan mendesain kontrak kompensasi yang mentolerir beberapa manajemen laba karena setiap kontrak mengalokasikan risiko antara kedua belah pihak lebih efisien. Praktisi dan regulator sering kali memiliki perbedaan persepsi dengan akademisi akuntansi tentang manajemen laba. Praktisi dan regulator sering memandang manajemen laba sebagai suatu problematika sedangkan akademisi tidak mampu memberikan bukti yang meyakinkan (Dechow dan Skinner, 2000).

Corporate governance yang efektif dapat menekan manajemen laba. Warfield et al. (1995) menguji apakah terdapat kecenderungan bahwa manajemen laba menunjukkan tingkat yang lebih rendah ketika kepentingan manajemen dan kepentingan pemilik saling terkait melalui kepemilikan saham manajerial yang lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi bahwa manajemen laba lebih rendah pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih tinggi. Sarbanes-Oxley Act (2002) menyatakan bahwa *corporate governance* yang lebih baik dapat meningkatkan integritas pelaporan keuangan.

Xie et al. (2003) menemukan bahwa dewan komisaris yang lebih besar berasosiasi dengan tingkat *discretionary current accrual* yang lebih rendah, mengindikasikan dewan komisaris yang lebih efektif dalam mengawasi setiap akrual daripada dewan komisaris yang lebih kecil. Klein (1998) menemukan hubungan negatif antara dewan komisaris independen dan *abnormal accruals*. Peasnell et al. (2000) memberikan bukti bahwa adanya dewan komisaris independen menurunkan manipulasi laba.

Young (1998) menggunakan sampel sebanyak 1178 observasi perusahaan non keuangan UK sepanjang tahun 1993-1996 dan memberikan bukti asosiasi negatif signifikan peningkatan akrual pendapatan dan proporsi anggota dewan luar perusahaan.

Peran dewan komisaris di Indonesia khususnya dewan komisaris luar perusahaan (*outside director*) masih menjadi perdebatan berkaitan dengan pengawasan terhadap manajemen dalam pengelolaan laba untuk menghasilkan kualitas pelaporan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *corporate governance* dalam hal ini karakteristik dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen laba. Penelitian ini akan menguji

pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen laba dengan menggunakan sampel perusahaan publik (tidak memasukkan perusahaan institusi keuangan) pada tahun 2007. Pendekatan model Healy dan Wahlen (1998) digunakan untuk mengestimasi *discretionary accruals* untuk memproksikan manajemen laba.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen laba di Indonesia"? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen laba di Indonesia.

2. KERANGKA TEORITIS

Manajemen Laba

Healy and Wahlen (1998) mendefinisikan *earnings management* terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam melaporkan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa stakeholders tentang dasar ekonomik perusahaan atau untuk mempengaruhi outcome kontraktual yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. *Manajemen laba* adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan khusus. Pemilihan kebijakan akuntansi diinterpretasikan dengan jelas. Ketika batas pembagian tidak jelas, manajemen laba membagi kebijakan akuntansi ke dalam dua kategori yaitu:

- 1) pilihan kebijakan akuntansi yang sesuai. Misal, amortisasi garis lurus atau saldo menurun, kebijakan untuk pengakuan pendapatan dan
- 2) *discretionally accruals*. Ketentuan untuk *credit losses*, nilai persediaan serta waktu dan jumlah item ekstarordinari.

Laba akuntansi berdasar Prinsip-prinsip Berlaku Umum (PABU) dapat dimanipulasi karena alternatif perlakuan kejadian akuntansi yang diperbolehkan. Manajemen laba dapat terjadi dengan melakukan pemilihan metode akuntansi, aplikasi metode akuntansi, dan ketepatan waktu akuisisi aktiva dan disposisi.

- 1) Pemilihan Metode Akuntansi. Pemilihan metode akuntansi mempengaruhi ketepatan waktu ketika pendapatan dan beban yang diakui dalam laba. Pemilihan berikutnya tentang pengakuan pendapatan dan penundaan pengakuan peningkatan beban yang dilaporkan dalam laba,
- 2) Aplikasi Metode Akuntansi/Estimasi Diskresionari. Setelah pemilik memilih metode

akuntansi, terdapat diskresionari dalam bentuk bagaimana prinsip-prinsip akuntansi diterapkan,

- 3) Ketepatan waktu metode akuntansi. Pemilik juga memiliki diskresionari sepanjang kapan dan bagaimana kejadian diakui sebagai kejadian akuntansi yang meminta pengungkapan dalam laporan keuangan dan
- 4) Ketepatan waktu. Ketepatan waktu akuisisi aktiva dan disposisi dapat mempengaruhi laba akuntansi. Pemilik dapat memilih ketika dan seberapa banyak investasi dalam R&D, iklan, dan biaya pemeliharaan, ketiganya diakui sebagai beban dalam periode ketika biaya terjadi. Pemilik juga memutuskan ketepatan waktu penjualan properti, peralatan dan ekuipmen untuk percepatan atau penundaan pengakuan keuntungan atau kerugian.

Pola manajemen laba dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Taking a bath*. Dapat dilakukan sepanjang periode organisasi yang tertekan atau reorganisasi termasuk menawarkan CEO baru,
2. *Income minimization*. Dipilih karena perusahaan dipandang secara politik sepanjang periode profitabilitas yang tinggi,
3. *Income maximization*. Manajer mungkin menggunakan pola memaksimalkan *net income* yang dilaporkan untuk tujuan bonus dan
4. *Income smoothing*. *Earnings* kemungkinan merugikan tujuan bonus. Perusahaan kemungkinan melaporkan *net income smoothing* untuk tujuan pelaporan eksternal.

Mohanram (tanpa tahun), menyatakan terdapat bermacam-macam alasan manajer mengatur laba.

Tingkat fundamental, alasan-alasan ini terkait dengan kinerja perusahaan yang terhubung dengan beberapa *benchmark*. *Benchmark* ini dapat menjadi kinerja periode sebelumnya (harapan untuk menunjukkan kecenderungan peningkatan), ekspektasi analis (harapan untuk ekspektasi), “zero” (harapan untuk sisa laba), atau apakah *benchmark* dikhususkan untuk kontrak kompensasi manajer (harapan untuk perolehan bonus).

Aboody dan Kasznick (2000) menunjukkan bahwa manajer cenderung untuk menunda pengungkapan berita baik dan mempercepat pengungkapan negatif dalam periode waktu hanya sebelum memperoleh dana opsi. Bartov dan Mohanram (2003) menunjukkan bahwa manajer menyesuaikan arah laba dengan menggunakan metode akuntansi peningkatan laba (*income increasing accounting method*) periode sebelum untuk besarnya pelaksanaan opsi dan metode penurunan laba (*income decreasing method*) sesudahnya.

Dewan Komisaris Sebagai Instrumen Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) tidak lain pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan *stakeholders* serta penggunaan sumber daya berprinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut, dalam keberadaannya penting dikarenakan dua hal. Hal yang pertama, cepatnya perubahan lingkungan yang berdampak pada peta persaingan global, sedangkan sebab kedua karena semakin banyak dan kompleksitas *stakeholders* termasuk struktur kepemilikan bisnis. Dua hal telah dikemukakan, menimbulkan: turbulensi, stres, risiko terhadap bisnis yang menuntut antisipasi peluang dan ancaman dalam strategi termasuk sistem pengendalian yang prima. *Good Corporate Governance* tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Pengukuran kinerja konsep GCG berdasarkan kepada lima dasar, yaitu: perlindungan hak pemegang saham, persamaan perlakuan pemegang saham, peranan *stakeholders* terkait dengan bisnis, keterbukaan dan transparansi, akuntabilitas dewan komisaris. Pengukuran kinerja tersebut juga berdimensi aktifitas operasional internal, intelektual kapital dan pembelajaran, kapasitas untuk inovasi dan respon terhadap pasar, produk dan penerimaan pasar, hubungan dengan pelanggan,

hubungan dengan investor, hubungan dengan partner dan *stakeholders* lainnya seperti Deperindag, hubungan dengan publik sasaran, lingkungan, keuangan.

Beberapa hal yang perlu digarisbawahi, untuk dapat menilai dunia usaha di Indonesia saat ini :

- (a) ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manajer;
- (b) tidak dipergunakan kaidah-kaidah usaha dalam bekerja karena lebih menyenangkan lobi;
- (c) kurangnya kesiapan sebagai *entrepreneur* yang mampu membawanya ke dunia usaha murni. Hal ini membawa pengusaha jauh dari *corporate governance*, sehingga tingkat kepercayaan dan kekuatan yang diterima dari relasi usaha rendah. Saat kondisi usaha bekerja dengan baik, pengaruh ini tidak terlihat tetapi di kala situasi ekonomi memburuk kehancuran usaha tidak terelakan.

Secara formal, *good corporate* hanya ditujukan bagi perusahaan yang statusnya merupakan perusahaan publik, khususnya emiten yang telah menyerap dana dari masyarakat dan memiliki saham publik yang sifatnya minoritas dan independen. Secara sederhana dapat digambarkan sebagai bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Caranya dengan menjalankan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dalam rangkaian kewajiban untuk transparansi, bertanggung jawab, adil dan akuntabilitas.

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *good corporate governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistiyanto dan Wibisono, 2003). Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, adalah

- (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan
- (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Sehingga penerapan konsep GCG di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

Manajemen Laba dan Karakteristik Dewan Komisaris

Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah *earnings management* ini sejalan dengan teori agensi (*agency theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha. Namun pemisahan ini mempunyai sisi negatif, keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk memonitor tindakan manajemen (Richardson, 1998; DuCharme et al., 2001). Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya (Healy & Wahlen, 1998; DuCharme et al., 2001). Sehingga secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan semangat GCG.

Dewan komisaris merupakan puncak sistem pengendalian dalam perusahaan besar, melaksanakan peran ganda dalam hal pengawasan dan pengesahan (Fama dan Jensen, 1983). Untuk memfasilitasi pengesahan keputusan yang efektif, dewan komisaris termasuk manajemen internal dengan pengalaman pembuatan keputusan perusahaan sedangkan untuk memfasilitasi pengawasan yang efektif dewan komisaris termasuk anggota dari luar perusahaan sebagai manajemen yang independen. Pendukung yang menganggap dewan komisaris sebagai pengawas memandang dewan komisaris luar perusahaan adalah pusat/sentral resolusi yang efektif masalah keagenan antara manajer dan *shareholders* (Famadan Jensen, 1983). Pengendalian keputusan yang efektif di prediksi sebagai fungsi positif rasio dewan komisaris luar perusahaan terhadap total anggota dewan, dengan motivasi untuk menghasilkan pengawasan yang insentif dari dewan komisaris luar perusahaan untuk mengembangkan reputasi untuk pengawasan yang efektif dalam pasar tenaga kerja eksternal. Beberapa penelitian juga memberikan bukti yang mendukung prediksi kemampuan pengawasan dewan adalah suatu fungsi positif baik

dalam hal proporsi dan independensi anggota dewan komisaris.

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mengatur tentang prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar direksi dapat berjalan efektif yaitu komposisi direksi, kemampuan dan integritas anggota direksi, fungsi direksi dan pertanggungjawaban direksi. Terdapat karakteristik dewan komisaris yaitu komposisi dewan, ukuran dewan, dan kepemilikan direktur. Penelitian ini akan menguji karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen laba.

Pengembangan Hipotesis

Independensi Dewan komisaris

Komponen dalam dewan komisaris adalah bagian penting untuk pengawasan yang efektif. Penunjukkan manajer sebagai direktur (*insider*) penting karena mereka memiliki lebih informasi tentang organisasi dibandingkan dengan direktur dari luar (*outside directors*). Bagaimanapun dominasi oleh *insider* kemungkinan menunjukkan transfer kesejahteraan untuk manajer dengan mengorbankan *stockholders* (Beasley, 1996; Fama 1980). Oleh karena itu, *outside director* ditunjuk dalam dewan komisaris utamanya untuk memperoleh mekanisme pengawasan independen atas proses dewan dengan demikian mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan kinerja (Craven dan Wallace, 2001).

Dewan komisaris terdiri dari *executive directors* dan *non-executive directors* (termasuk *independent non-executives*). Dewan komisaris harus meyakinkan bahwa anggota-anggotanya yang baik secara keseluruhan memiliki berbagai pengetahuan, *judgment*, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat. Perusahaan diharapkan menyusun jumlah minimum *independent non-executive director* untuk duduk dalam dewan untuk meyakinkan keseimbangan tidak adanya individu atau kelompok kecil individu yang dapat mendominasi pembuatan keputusan dewan komisaris. Direktur yang independen ketika dia bebas dari beberapa bisnis, keluarga atau hubungan lainnya dengan perusahaan, mengendalikan pemegang saham atau manajemen yang menimbulkan konflik kepentingan. *Non-executive director* adalah pihak yang tidak melakukan manajemen perusahaan harian. *Non-executive director* memiliki peran penting dalam mengawasi *executive director* dan menyetujui situasi pemecahan konflik kepentingan. Peasnell et al. (2000) melaporkan bahwa *independent non-executive director* memiliki kapabilitas untuk mendeteksi

manajemen laba. Berdasarkan telaah literatur di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : rasio *independent non-executive director* berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Ukuran Dewan Komisaris

Beberapa peneliti telah menguji ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris jumlah kecil dianggap lebih efektif karena mereka tidak banyak kesulitan dalam berkoordinasi (Jensen, 1993, Yermack, 1996; Eisenberg, Sundergren and Wells, 1998). Direktur dalam dewan komisaris yang lebih kecil lebih berkeinginan untuk membahas masalah dan dewan komisaris yang lebih kecil lebih sedikit berisiko dan dapat bereaksi lebih cepat terhadap perubahan kondisi pasar (Yermack, 1996). Dalton et al. (1999) menemukan bahwa perusahaan dengan dewan komisaris yang lebih besar memiliki lebih banyak hubungan eksternal, kemampuan sumber-sumber daya penting seperti pendanaan, dan berkemampuan atau berpengalaman dalam menjalankan bisnis dan atribut ini menunjukkan kinerja yang lebih baik. Ukuran dewan komisaris diindikasikan dapat mengurangi manajemen laba. Berdasarkan telaah literatur di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₂: ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Kepemilikan Manajerial

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan saham dan pengendalian atas publik perusahaan menciptakan konflik kepentingan antara manajer dan *stockholders*. Kepemilikan manajerial yang lebih besar menunjukkan kepentingan manajerial yang lebih besar dari kepentingan *stockholders*. Konflik muncul ketika manajer memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya (misal melalui maksimisasi bonus) dengan mengorbankan pemegang saham. Healy (1985) menyatakan bahwa penggunaan angka akuntansi dalam kontrak bonus akan mendorong manajer untuk menyesuaikan tingkat laba agar dapat memaksimalkan bonus yang diperoleh. Kepemilikan manajerial yang lebih besar menguntungkan pemegang saham karena meningkatnya keinginan manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi ketika kepemilikan manajerial menjadi lebih besar maka manajer mampu untuk mensejahterakan manajer itu sendiri. Demsetz dan Lehn (1985), Warfield, Wild and Wild (1995) menemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dan

manajemen laba. Berdasarkan telaah literatur di atas, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₃: kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Karakteristik Dewan komisaris

Pada pedoman umum Good Corporate Indonesia (2006) menyatakan bahwa tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

1. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko,
2. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham,
3. Terlindunginya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar, dan
4. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen,
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan dan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dari penjelasan di atas maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₄: karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian juga menggunakan variabel kontrol *size*, *leverage*, kinerja operasi, arus kas operasi, dan jenis industri. Variabel-variabel tersebut digunakan karena menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan/laba. Kepengurusan perseroan terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya

masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*), namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan perusahaan.



3. METODE PENELITIAN

Model Penelitian

Penelitian ini mengukur manajemen laba menggunakan model *modified Jones* untuk memberikan gambaran bahwa manajemen laba mencerminkan perilaku oportunistik manajemen:

$$TACC_i = NDAC_i + DAC_i \dots\dots\dots (1)$$

TACC : *total accrual*

NDAC : *non-discretionary accruals*

DAC : *discretionary accruals*

$TACC_i$: *total accrual* untuk perusahaan *i* yang dihitung sebagai perbedaan antara pendapatan sebelum pajak dan *extraordinary item (EARN)* dan arus kas operasi (OCF):

$$TACC_i = EARN_i - OCF_i \dots\dots\dots (2)$$

Non-discretionary accruals (NDAC_{*i*}) dihitung dengan persamaan berikut:

$$TACC_i/A_{i-1} = \alpha_1(1/A_{i-1}) + \alpha_2(\Delta REV_i/A_{i-1}) + \alpha_3(PPE_i/A_{i-1}) + v_i \dots\dots\dots (3)$$

$$DAC_i = TACC_i - NDAC_i \dots\dots\dots (4)$$

Setelah menghitung *discretionary accrual*, langkah berikutnya adalah menguji hipotesis dengan menggunakan beberapa variabel kontrol.

Definisi Operasional

DAC : *discretionary accrual* untuk memproksikan manajemen laba.

ExB : *independent non-executive directors* seseorang yang memiliki kemampuan, keahlian dan pengalaman untuk memberikan keputusan yang independen.

SzB : jumlah aktual anggota dewan yang terdiri dari *executive* dan *independent non executive directors*.

KMJ : kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan.

SIZE : variabel ini digunakan untuk memproksikan *political cost* karena terdapat kemungkinan perusahaan yang ukurannya semakin besar akan menjadi obyek *political cost*.

LEV : kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

OP : digunakan sebagai proksi kinerja operasi. ROA mengukur pengembalian seluruh aset perusahaan dan sering digunakan index profitabilitas secara keseluruhan, nilai yang dihasilkan semakin tinggi maka bisnis perusahaan semakin menguntungkan.

CFO : menggambarkan aktivitas arus kas dari operasi.

IND : menggambarkan jenis industri yang memiliki pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap manajemen laba.

Populasi dan Sampel

Sampel diambil dari perusahaan publik tidak termasuk perusahaan institusi keuangan tahun 2007 yaitu:

- 1) Agriculture, Forestry and Fishing,
- 2) Animal Feed and Husbandry,
- 3) Mining and Mining Services,
- 4) Construction,
- 5) Manufacturing,
- 6) Transportation Services,
- 7) Communication,
- 8) Whole Sale and Retail Trade,
- 9) Hotel and Travel Services, Holding and
- 10) Other. Data kuantitatif berupa *annual report* periode 2007 dan 2008 (akan digunakan untuk menghitung manajemen laba_{*t+1*})

Tabel 1
Deskripsi Sampel

No.	Jenis Industri	Jumlah
1.	Agriculture, Forestry & Fishing	9
2.	Animal Feed & Husbandry	4
3.	Mining & Mining Services	12
4.	Constrution	9
5.	Manufacturing	126
6.	Transportation Services	13
7.	Communication	4
8.	Whole Sale and Retail Trade	21
9.	Hotel and Travel Services, Holding	53
10.	Other	20
	Total Sampel	271

Sumber Data

Data kuantitatif berupa *annual report* periode 2007 dan 2008 (akan digunakan untuk menghitung manajemen laba $_{t+1}$) dan untuk data dewan komisaris

serta rasio kepemilikan manajemen.

Metode Analisis Data

Peneliti menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris dan manajemen laba. Karakteristik dewan komisaris diproksikan dengan persentase *independent non-executive directors* terhadap total anggota dewan, total dewan komisaris dan jumlah kepemilikan manajerial sedangkan manajemen laba diproksikan oleh *discretionary accruals*. Penelitian juga menggunakan variabel kontrol yaitu *size*, *leverage*, kinerja operasi, arus kas operasi, dan jenis industri. Sebelum menguji hipotesis, pertama-tama peneliti akan menghitung *discretionary accruals* dengan menggunakan model *modified Jones* untuk menghitung manajemen laba. Hipotesis ini akan diuji menggunakan satu buah regresi dengan menggunakan variabel kontrol yaitu *size*, *leverage*, kinerja operasi, arus kas operasi, dan jenis industri:

$$DAC_i = \alpha_1 + \alpha_2 ExB + \alpha_3 SzB + \alpha_4 KMJ + \alpha_5 SIZE + \alpha_6 LEV + \alpha_7 OP + \alpha_8 CFO + \alpha_9 IND$$

Keterangan:

DAC : *discretionary accrual*

ExB : rasio *independent non-executive directors* terhadap total anggota dewan komisaris.

SzB : jumlah aktual anggota dewan komisaris.

KMJ : persentase aktual total kepemilikan manajemen.

SIZE : *natural logarithm* total asset.

LEV : *natural logarithm* hutang/total asset

OP : *return on* total asset $_{t-1}$.

CFO : laba operasi – total akrual/total asset.

IND : *dummy* variabel untuk jenis industry.

Hasil Analisis Data

Pertama-tama dilakukan pengujian *discretionary accrual* untuk menghitung manajemen laba. Dari hasil pengujian menunjukkan rata-rata terjadi manajemen

laba cenderung penurunan laba. Hipotesis pada penelitian akan diuji menggunakan regresi berganda. Berikut data deskriptif statistik untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 2
Deskripsi Statistik

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAC	271	- 2.399508	1.331664	- .041822	.283399354
ExB	271	.00	1.00	.3125	.17062
SzB	271	2	12	4.08	1.729
SIZE	271	14141.00	5E+007	2528616	5052939.669
LEV	271	.00	3.37	.5756	.41165
OP	271	- .87	.99	.0393	.11885
CFO	271	- 1144064	8273929	239208.94	846969.908
IND	271	0	1	.46	.500
KMJ	271	.000000	1.000000	.02460751	.098573914
Valid N (listwise)	271				

Tabel 2 menunjukkan terjadinya *decreasing income* yang tampak pada nilai rata-rata manajemen laba sebesar -0,41822. Komposisi rasio *independent non-*

executive directors terhadap total anggota dewan komisaris 0,3125. Hal ini dikarenakan karena pola komposisi dewan komisari independen sebanyak satu

(1) orang dibanding jumlah total dewan komisaris yang ada. Sedangkan total dewan komisaris pada sampel yang digunakan menunjukkan rata-rata ber-

jumlah 4 orang. Kepemilikan manajerial di Indonesia tidak banyak bahkan cenderung tidak ada. Penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik.

Tabel 3
Hasil Uji Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.021	.062		.344	.731		1.006
ExB	-.048	.098	-.029	-.493	.623	.994	1.347
SzB	.007	.011	.042	.614	.540	.743	2.800
SIZE	-1.2E-009	.000	-.022	-.227	.821	.357	1.053
LEV	-.124	.041	-.180	2.992	.003	.949	1.108
OP	.500	.147	.210	3.395	.001	.903	2.538
CFO	-1.3E-008	.000	-.038	-.408	.684	.394	1.020
IND	-.034	.034	-.059	-.997	.320	.980	1.009
KMJ	-.103	.169	-.036	-.607	.544	.991	

a. Dependent Variable: DAC

Tabel 3 menunjukkan variabel kontrol yaitu jenis industri menunjukkan bahwa DAC perusahaan non manufaktur lebih rendah 0,034 dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa rasio komisaris independen memiliki nilai signifikansi $0,623 > 0,05$ yang berarti menerima H_0 . Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif rasio dewan komisaris independen terhadap manajemen laba tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Total dewan komisaris menunjukkan hasil

signifikansi sebesar $0,540 > 0,05$ yang berarti menerima H_0 . Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa total dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Sedangkan kepemilikan manajerial menunjukkan hasil $0,544 > 0,05$ yang berarti menerima H_0 . Tabel 3 di atas menunjukkan adanya pengaruh negatif kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba dan menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Tabel 4
Hasil Uji Regresi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.135	8	.267	3.576	.001 ^a
	Residual	19.551	262	.075		
	Total	21.685	270			

a. Predictors: (Constant), KMJ, LEV, ExB, SzB, IND, OP, CFO, SIZE

b. Dependent Variable: DAC

Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian regresi yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti bahwa H_0 ditolak yaitu karakteristik

dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba dengan memasukkan variabel kontrol di dalamnya.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan tidak adanya pengaruh rasio dewan komisaris independen, total dewan komisaris dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Perusahaan yang digunakan dalam sampel penelitian ini hanya memiliki satu (1) orang dewan komisaris independen. Di

Indonesia tidak terdapat ketentuan untuk jumlah anggota dewan komisaris independen, hanya saja keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, salah

satu dewan komisaris independen ini harus memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi. Fungsi dewan komisaris adalah sebagai pengawas dan penasihat serta tidak bertindak sebagai pengambil keputusan operasional karena tugas pengambilan keputusan operasional menjadi tanggung jawab dewan direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio independen dewan komisaris berasosiasi dengan menurunnya manajemen laba hanya saja tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini dikarenakan jumlah dewan komisaris independen di Indonesia tidak lebih besar dari anggota dewan atau dengan kata lain terdapat komposisi anggota dewan yang tidak tepat. Kemungkinan lain adalah karena latar belakang dewan komisaris yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian di bidang keuangan karena jika terdapat dewan komisaris yang memiliki latar belakang tersebut maka pengawasan dapat lebih ditingkatkan, sedangkan fungsi dari dewan komisaris independen dapat melindungi pemegang saham jika terjadi konflik keagenan.

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berasosiasi positif terhadap manajemen laba. Di Indonesia tidak memiliki ketentuan mengenai jumlah anggota dewan komisaris. Banyaknya anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dewan komisaris bisa terdiri dari komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Anggota dewan memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, anggota dewan harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas. Perspektif terhadap dewan komisaris sebagai sebuah fungsi tidak hanya pada komposisi dewan tetapi juga pada struktur dewan dan komposisi sub komite dewan. Tugas dewan komisaris meliputi:

1. Mengatur organisasi dengan menetapkan tujuan dan kebijakan umum,
2. Memilih, menunjuk, mendukung dan memeriksa kinerja dewan direksi,
3. Meyakinkan akan ketersediaan sumber keuangan yang memadai,
4. Menyetujui anggaran tahunan, dan
5. Akuntansi untuk stakeholder atas kinerja organisasi.

Sebab lain mengapa dewan komisaris tidak dapat menekan manajemen laba dikarenakan:

- 1) dewan komisaris merupakan badan yang bersifat paruh waktu yang hanya bertemu sesekali dan

tidak saling mengenal dengan baik satu sama lain, dan

- 2) komisaris kemungkinan tidak memiliki waktu dan keahlian yang diperlukan untuk memahami secara rinci bisnis perusahaan yang memungkinkan manajemen untuk mengaburkan masalah.

Hasil pengujian kepemilikan manajerial menunjukkan adanya asosiasi negatif terhadap manajemen laba. Manajemen perusahaan diberikan kesempatan untuk memiliki saham perusahaan. Kepemilikan manajerial atas saham perusahaan memungkinkan terjadinya manajemen laba yang bertujuan untuk pemerolehan keuntungan bagi pihak manajemen. Oleh karena itu, adanya kepemilikan manajerial cenderung meningkatkan manajemen laba. Dari hasil pengujian menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hal ini dikarenakan dari sampel yang digunakan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mendominasi kepemilikan saham di perusahaan sehingga pola peningkatan manajemen laba tidak terjadi. Dari hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa karakteristik dewan komisaris mempengaruhi manajemen laba setelah memasukkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, rasio profitabilitas, arus kas operasi dan jenis industri.

Simpulan

Dewan komisaris memiliki tugas sebagai pengawas pelaksanaan tugas dewan direksi. Dewan komisaris bisa terdiri dari komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Jumlah dewan komisaris ditentukan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang tidak begitu banyak dapat memudahkan intensitas pertemuan di antara para anggota dewan. Selain itu diperlukan adanya komisaris independen yang berfungsi melindungi pemegang saham jika terjadi konflik keagenan. Dewan komisaris ini juga diharapkan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Keberadaan dewan komisaris independen dapat menekan perilaku manajemen dalam mengelola laba hanya saja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Keberadaan dewan komisaris tidak dapat menekan manajemen laba. Hal ini dikarenakan intensitas pertemuan yang tidak sering dilakukan dan pemahaman atas bisnis perusahaan yang tidak cukup baik. Kepemilikan manajerial di Indonesia tidak mendominasi kepemilikan secara keseluruhan sehingga tidak ada kecenderungan perilaku manajemen untuk mengelola laba yang dapat memberikan keuntungan pribadi.



5. IMPLIKASIDAN KETERBATASAN

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang sekaligus merupakan implikasi untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian karakteristik dewan komisaris dapat mengkaitkan dewan *good corporate governance*, dan

2. Menggunakan latar belakang dewan komisaris independen yang memiliki pemahaman akuntansi dan keuangan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aboody, D and R. Kasznick. 2000. *CEO Stock Option Awards and The Timing of Corporate Voluntary Disclosure*. Journal Accounting and Economics 29: 73-100.
- Bartov, E. and P. Mohanram. 2003. *Private Information, Earnings Manipulations, Executive Stock Option Exercises*. Working Paper-Columbia University New York University.
- Beasley, M.S. 1996. *An Empirical Analysis of The Realtion Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud*. The Accounting Review 71: 443-465.
- Cravens, K. S and Wallace, W.A. 2001. *A Framework for Determining The Influence of The Corporate Board of Directors in Accounting Studies*. Corporate Governance 9: 2-24.
- Dalton, D.R, C.M. Daily, J.L. Johnson, and A.E. Ellstrand. 1999. *Number of Directors and Financial Performance: A Meta Analysis*. Academy of Management Journal 42: 674-686.
- DeAngelo, H., L. DeAngelo and D. J Skinner. 1994. *Accounting Choice in Troubled Companies*. Journal of Accounting and Economics 17: 113-144.
- Dechow, P. M., and J.S. Douglas. 2000. *Earnings Management: Reconciling The Views of Accounting, Academics, Practitioners, and Regulators*. Accounting Horizon Vol. 13 No. 2 June, 236-250.
- Dechow, P.M., R.D. Sloan, and A.P. Sweeney. 1995. *Detecting Earnings Management*. The Accounting Review 70: 193--225.
- Defond, M.L and J. Jimbalvo. 1994. *Debt Covenant Violation and Manipulation of Cruals*. Journal of Accounting and Economics 17: 145--176.
- Demsetz, H. and K. Lehn. 1985. *The Structure of Corporate Ownership Causes and Consequences*. Journal of Political Economy 93: 1115-1177.
- Djalil, S. A. 2000. *Good Corporate Governance*. Seminar Corporate Governance. Universitas Sumatera Utara.
- DuCharme, L., P. Malatesta, and S. Sefcik. 2001. *Earnings Management: IPO Valuation and Subsequent Performance*, Journal of Accounting, Auditing and Finance 16, 369-396.
- Eisenberg, T., Sundgren, S and Wells, M. 1998. *Larger Board Size and Decreasing Firm Value in Small Firms*. Journal of Finance Economics 48: 35-54.
- Fama, E and M. Jensen. 1983. *Agency Problems and Residual Claims*. Journal of Law and Economics 26: 327-350.
- Fama, E.F. 1980. *Agency Problems and The Theory of The Firm*. Journal of Political Economy 88: 288-307.
- Healy, P. M. 1985. *The Effect of Bonus Scheme on Accounting Decisions*. Journal of Accounting and Economics 7: 85-107.
- Healy, P.M and J.M. Wahlen. 1998. *A Review of The Earnings Management Literature and Its Implication for Standard Setting*. Accounting Horizon 13: 365-383.

- Holthausen, R. W, D. Larcker and R. Sloan. 1995. *Annual Bonus Schemes and The Manipulation of Earnings*. Journal of Accounting and Economics 12, 207-218.
- Jensen, M and W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3: 305-360.
- Jensen, M. C. 1993. *The Modern Industrial Revolution, Exit and The Failure of Internal Control Systems*. Journal of Finance 48, 831-880.
- Jones, J. 1991. *Earnings Management During Import Relief Investigations*. Journal of Accounting Research, Autumn, 193-228.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Klein, A. 1998. *Firm Performance and Board Committee Structure*. Journal of Law and Economics Forthcoming.
- Mohanram, Partha S. None. How to manage earnings management?, Working Paper, Graduate Schoo; of Business, Columbia University.
- Peasnell, K.V., P.F. Pope and S. Young. 2000. *Detecting Earnings Management Using Cross-Sectional Abnormal Return Accruals Models*. Accounting and Business Research 30: 313-326.
- Richardson, V. 1998. *Information Asymmetry and Earnings: Some Evidence*. Review of Quantitative Finance and Accounting 15 (4), 325-347.
- Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX). 2002. *Corporate and Auditing and Accountability, Responsibility, and Transparency Act of 2002*. U.S. Public Law 107-204. 107th Cong., 2d sess., 30 July 2002.
- Sulistyanto, H.S., dan H. Wibisono. 2003. *Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?*. Jurnal Widya Warta No. 2, tahun XXVI/Juli 2003, ISSN: 0854-1981.
- Warfield, T.D., J.J. Wild, and K.L. Wild. 1995. *Managerial Ownership, Accounting Choices, and Informativeness of Earnings*. Journal of Accounting and Economics 20: 61-91.
- Yermack, D. 1996. *Higher Market Valuation of Companies with Small Board of Earnings Management and Boar Characteristics Directors*. Journal of Financial Economics 40: 185-211.
- Young, S. 1998. *The Determinants of Managerial Accounting Policy Choice: Further Evidence for the UK*. Accounting and Business Research 28: 131-143.
- Xie, B., W.N. Davidson, P.J. DaDalt. 2003. *Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee*. Journal of Corporate Finance 9 (3), 295-316.